



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB**

Jalan. Jenderal Ahmad Yani No.17A, Ps. I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Kode Pos 31311, Telp/ Fax.(0734) 421194
www.pn-muaraenim.go.id, pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

Muara Enim, 09 Februari 2026

Nomor : 529 SEK.03.W6-U6/KU2.1/II/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Semester II TA 2025
Pengadilan Negeri Muara Enim (099232)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lahat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pemerintah pusat, dengan ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim Periode Semester II TA 2025 sebagaimana terlampir. Adapun lampiran Laporan keuangan tersebut terdiri atas :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan
6. Surat Hasil Rekonsiliasi

Kami juga telah menyampaikan *softcopy* laporan keuangan tersebut melalui *email* kppn.lahat@kemenkeu.go.id.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris,

Kuasa Pengguna Anggaran



(YURIKA ARIANI, ST, MM)
NIP 198007242006042003



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
JALAN JENDERAL AHMAD YANI NO. 17 A MUARA ENIM 31311
TELP/FAX. (0734) 421194 EMAIL. PENGADILANNENERIMUARAENIM@GMAIL.COM
WWW.PN-MUARAENIM.GO.ID

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
005.03.099232

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 17A Muara Enim
Email : pengadilannegerimuaraenim@gmail.com
Telpon/Fax : (0734)421194

Pengadilan Negeri Muara Enim

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Muara Enim adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Muara Enim, 9 Pebruari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Yurika Arlani, ST.,MM
198007242006042003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	

C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Muara Enim, 9 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran



Yurika Ariani, ST.,MM

NRP. 198007242006042003

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.074.000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.074.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp316.612.150 atau mencapai 0,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp0.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp3.728.723 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp3.728.723; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp3.728.723

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.074.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp316.792.150 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-311.718.150, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-311.718.150

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp275.000, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-311.718.150 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 315.171.873 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp3.728.723

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
3	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
4	Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
5	Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
6	Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025
8	Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
9	Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
10	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025
11	Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
12	Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
13	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
14	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
15	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
16	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024
17	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

DAFTAR GRAFIK

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	I	SURAT HASIL REKONSILIASI (SHR) PERIODE 12
LAMPIRAN	II	MON SAKTI PERIODE 12 TA 2025
LAMPIRAN	III	GLP SAKTI PERIODE 12 TA 2025
LAMPIRAN	IV	ASET TETAP PERIODE 12 TA 2025
LAMPIRAN	V	BA REKONSILIASI DAN TELAAH CALK SEMESTER II TA 2025
LAMPIRAN	VI	LPJ BENDAHARA DESEMBER 2025

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	-	5.074.000	-	11.048.500
JUMLAH PENDAPATAN		-	5.074.000	-	11.048.500
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	-	316.612.150	-	355.669.050
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		-	316.612.150	-	355.669.050

Muara Enim, 9 Pebruari 2026
Kuasa Penggaya Anggaran



Yurika Ariani, ST.,MM
198007242006042003



LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	5.074.000	11.048.500
Jumlah Pendapatan		5.074.000	11.048.500
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	90.913.750	102.369.739
Beban Barang dan Jasa	D.5	222.398.400	187.177.700
Beban Pemeliharaan	D.6	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.7	3.480.000	71.760.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	-	-
Jumlah Beban		316.792.150	361.307.439
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(311.718.150)	(350.258.939)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(311.718.150)	(350.258.939)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(311.718.150)	(350.258.939)



Muara Enim, 9 Pebruari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

Yurika Ariani, ST.,MM
198007242006042003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	275.000	300.000
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(311.718.150)	(350.258.939)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	315.171.873	350.233.939
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		3.453.723	(25.000)
EKUITAS AKHIR	E.6	3.728.723	275.000



Muara Enim, 9 Pebruari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran

Yurika Ariani, ST.,MM
198007242006042003

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

U R A I A N	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	-	-
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.5	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6	-	-
Piutang Perpajakan	C.7	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.8	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.12	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.13	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.14	-	-
Persediaan	C.15	3.728.723	275.000
Persediaan yang Belum Diregister	C.16	-	-
Jumlah Aset Lancar		3.728.723	275.000
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.17	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.18	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.19	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.20	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi	C.21	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	C.22	-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.23	-	-
Tanah Belum Diregister	C.24	-	-
Peralatan dan Mesin	C.25	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.26	-	-
Gedung dan Bangunan	C.27	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.28	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.29	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.30	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.31	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.32	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.33	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.34	-	-
Aset Konsesi Jasa	C.35	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	C.36	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.37	-	-
Aset Tak Berwujud	C.38	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.39	-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.40	-	-
Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	C.41	-	-
Aset Lain-lain	C.42	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.43	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.44	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3.728.723	275.000
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.45	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.46	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.47	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.48	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.49	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.50	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.51	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
Kewajiban Konsesi Jasa	C.52	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-

EKUITAS			
Ekuitas	C.53	3.728.723	275.000
JUMLAH EKUTAS		3.728.723	275.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.728.723	275.000

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis**

Dasar hukum Entitas
dan Rencana Strategis

Sebelum tahun 2004, Pengadilan Negeri Muara Enim berada dibawah Departemen Hukum dan HAM dan baru sejak diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum maka seluruh Peradilan yang berada di seluruh Indonesia berada satu atap di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Negeri Muara Enim resmi naik kelas, dari Type/ Kelas II menjadi Type/Kelas IB sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 771/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang pemberlakuan peningkatan kelas Pengadilan Negeri Muara Enim dari Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Muara Enim Kelas IB

VISI

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung"

MISI

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara Enim

TUJUAN

"Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan ""

KEBIJAKAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

1. Upaya sistematis peningkatan metode minutasi, menggunakan template elektronik untuk mempercepat proses monitoring dan evaluasi
2. Tertib dalam pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
3. Melaksanakan perintah Mahkamah Agung yang tertuang dalam SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Pengadilan Tingkat Banding
4. Evaluasi penyelesaian perkara yang dilaksanakan dalam setiap rapat bulanan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Upaya Peningkatan pemberian layanan Posbakum.
2. Upaya Peningkatan Pelayanan Publik.
3. Upaya Peningkatan Wilayah Zona Integritas
4. Upaya Peningkatan Keterbukaan Informasi

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Muara Enim. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Muara Enim. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-LRA***(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO***(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja***(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- a. **Aset Lancar**
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
 - Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
 - Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

- b. Aset Tetap**
- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- c. Penyusutan Aset Tetap**
- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. **Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. **Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. **Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	25.892.000	-
Jumlah Pendapatan	25.892.000	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	323.391.000	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	323.391.000	-

Realisasi Pendapatan
Rp5.074.000

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.074.000 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Pengadilan Negeri Muara Enim terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp5.074.000. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	5.074.000	-
Jumlah	-	5.074.000	-

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 54,08 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.074.000	11.048.500	(54,08)
Jumlah	5.074.000	11.048.500	(54,08)

Realisasi Penerimaan
Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 . Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Adapun rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
Pendapatan Pajak/Bea Cukai	-	-	-

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp5.074.000 dan Rp11.048.500. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 54,08 dari TA 2024 Pengembalian BSU Non PNS Dari Anggaran Dirjend Pendis, namun pengembaliannya menggunakan Akun Pemngembalian Satker dimana Pegawai ditugaskan. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	5.074.000	11.048.500	(54,08)
Jumlah	5.074.000	11.048.500	(54,08)

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah padaPanitera Badan Peradilan	330.000	670.000	(50,75)
Pendapatan Ongkos Perkara	2.080.000	4.505.000	(53,83)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2.664.000	5.873.500	(54,64)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	5.074.000	11.048.500	(54,08)

B.2 Belanja

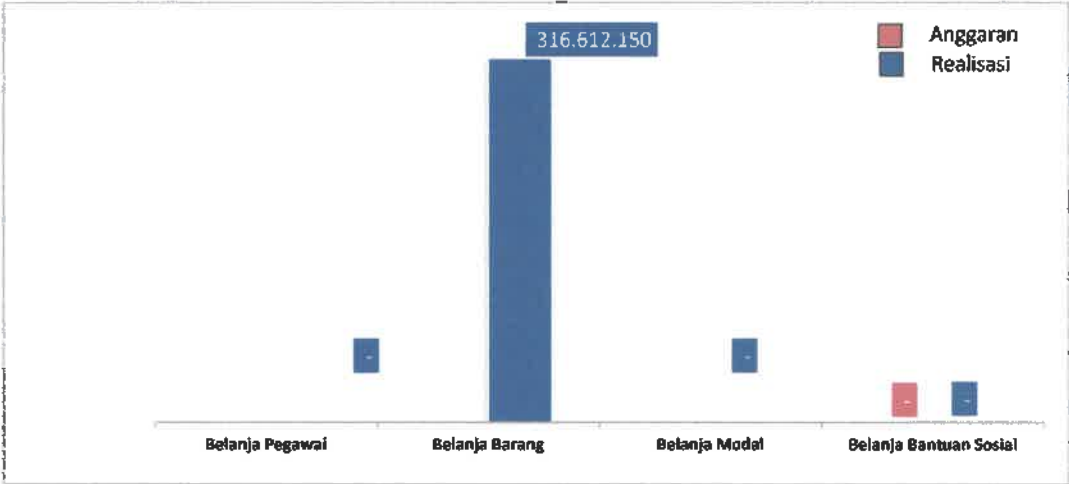
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp316.612.150 atau 0,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.0 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	-	316.612.150	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	-	316.612.150	-

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 10,98% . Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	316.612.150	355.669.050	(10,98)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	316.612.150	355.669.050	(10,98)

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 sebesar 0,00 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2024 Tidak ada Pagu Anggaran Belanja Pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	-	-	-
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp316.612.150 dan Rp355.669.050. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 10,98% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan/penurunan belanja tidak banyak perubahan

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	9.374.800	6.664.300	40,67
Belanja Barang Non Operasional	169.046.000	136.535.800	23,81
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	90.733.750	96.731.350	(6,20)
Belanja Jasa	43.977.600	43.977.600	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.480.000	71.760.000	(95,15)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	316.612.150	355.669.050	(10,98)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	316.612.150	355.669.050	(10,98)

Adapun informasi alokasi anggaran belanja untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

Jumlah pagu anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 adalah sebesar Rp0. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Barang untuk Penangan Pandemi Covid-19 TA 2025

URAIAN	Anggaran	REALISASI T.A. 2025	%
Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Tahun 2023 Terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang lebih banyak.

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan .

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Selisih Harga sehingga tidak terealisasi seluruhnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Piutang Bukan Pajak
Rp0

C.9 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih - Piutang
Bukan Pajak Rp0

C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.11 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dengan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar TPA&. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran tersebut adalah sebagai berikut :

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

C.13 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan TP/TGR yang belum direalisasikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.14 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan bagian lancar tagihan TP/TGR &. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi tersebut adalah sebagai berikut :

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.5%	#VALUE!
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		#VALUE!

Persediaan
Rp3.728.723

C.15 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.728.723 dan Rp275.000. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	3.728.723	275.000
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Jumlah	3.728.723	275.000

Persediaan tersebut di atas dalam

Penjelasan terkait dengan persediaan dalam rangka penanganan pandemi covid-19

Persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 merupakan sisa persediaan yang dibeli sendiri atau berasal dari transfer dan hibah yang masih bersaldo dalam keadaan baik dan siap pakai pada tanggal 31 Desember 2025. Berikut ini daftar persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Rincian Persediaan dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19

No.	Nama Barang Persediaan	Jumlah Unit	Nilai Rupiah
1			
2			
3			
4			
Jumlah		-	-

Persediaan yang Belum
Diregister Rp0

C.16 Persediaan yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp0

C.17 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp0

C.18 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Debitur	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Jangka Panjang lainnya Rp0

C.19 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Rp0

C.20 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2025 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Tagihan PA			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-
Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Properti Investasi Rp0

C.21 Properti Investasi

Nilai Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Properti Investasi 31 Desember 2025 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Properti Investasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024		
URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

Akumulasi Penyusutan
Properti Investasi Rp0

C.21 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi merupakan kontra akun Aset Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Properti Investasi.

Tanah Rp0

C.23 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025			
No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			-

Penjelasan tentang kondisi Tanah

Tanah Belum Diregister
Rp0

C.24 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin
Rp0

C.25 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- a.
- b.
- c.
- d.

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Belum Diregister Rp0

C.26 Peralatan dan Mesin Belum Diregister
Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan
Rp0

C.27 Gedung dan Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Kesalahan input IP	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

-
-
-

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

-
-
-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Belum Diregister Rp0

C.28 Gedung dan Bangunan Belum Diregister
Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.29 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	-

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- -

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.30 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya
Rp0

C.31 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi tambah/kurang:

0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap yang Belum
Diregister Rp0

C.32 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0 dan Rp.0.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.33 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap Rp0

C.34 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

C.35 Aset Konsesi Jasa

Saldo Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Aset Konsesi Jasa merupakan aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa baik yang disediakan oleh mitra atau disedikan oleh pemberi konsesi. Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Konsesi Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

U R A I A N	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Jumlah	-	-

C.37 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No	U r a i a n	Jumlah
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
	Jumlah	-

C.38 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Muara Enim berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
-
-
-
-
-

C.39 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per	-
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	-

C.40 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang telah dikeluarkan dari rekening kas negara dan pengeluarannya telah membebani pagu anggaran (telah dicatat sebagai realisasi anggaran), namun demikian dana tersebut masih dalam penguasaan pemerintah dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga walaupun peruntukannya telah ditentukan. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
Dana Lainnya	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Yang Dibatasi Penggunaannya :

-

C.41 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Nilai Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri merupakan dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia Adapun rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri

Uraian	T.A. 2025	T.A. 2024
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total	-	-

Penjelasan Dana Cadangan Perwakilan RI :

-

C.42 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah	-
-	-
-	-
Mutasi Kurang	-
-	-
-	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya yang
Belum Diregister Rp0

C.43 Aset Lainnya yang Belum Diregister
Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 0

C.44 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapsitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
-	-	-	-
Total	-	-	-

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.45 Utang kepada Pihak Ketiga
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0

C.46 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :
dgsdfgfdsgjahdfihdsifhsif

Hibah Yang Belum Disahkan Rp0

C.47 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :
hibah yang belum disahkan berasal dari bank

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0

C.48 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :
9afhasgdfgsdaifsgdhaf

Pendapatan Diterima Dimuka Rp0

C.49 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :
berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.50 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0

C.51 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

jlkjhjgijhgijghckj

Kewajiban Konsesi Jasa
Rp0

C.52 Kewajiban Konsesi Jasa

Saldo Kewajiban Konsesi Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kewajiban Konsesi Jasa merupakan kewajiban yang muncul karena adanya perolehan aset konsesi jasa.

Rincian Kewajiban Konsesi Jasa adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

tentang konsesi jasa

Ekuitas Rp3.728.723

C.53 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.728.723. dan Rp275.000. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 49 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Perpajakan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Pajak Penghasilan	-	-	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	-	-	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan BPHTB	-	-	-
Pendapatan Cukai	-	-	-
Pendapatan Pajak Lainnya	-	-	-
Pendapatan Bea Masuk	-	-	-
Pendapatan Bea Keluar	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp5.074.000

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.074.000 dan Rp11.048.500. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 54,08. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana	-	-	-
Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	5.074.000,00	11.048.500,00	(54,08)

Beban Pegawai
Rp0

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh . Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp90.913.750 dan Rp102.369.739

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 11,19 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	90.913.750	102.369.739	(11,19)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	90.913.750,00	102.369.739	(11,19)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp222.398.400 dan Rp187.177.700.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 18,82 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Terjadi Kenaikan Beban Barang dan jasa karena Peningkatan kegiatan dan anggaran yang tersedia di Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.374.800	6.664.300	40,67
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-	-	-
Beban Barang Operasional Lainnya	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	-	-	-
Beban Langganan Telepon	-	-	-
Beban Langganan Air	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Jumlah	222.398.400	187.177.700,00	18,82

Beban Pemeliharaan
Rp0

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 sebesar 0,00 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban pemeliharaan disebabkan adanya penurunan tingkat kerusakan gedung dan peralatan mesin Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Perjalanan Dinas
Rp3.480.000

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.480.000 dan Rp71.760.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 95,15 persen disebabkan oleh Kenaikan biaya perjalanan dinas dikarenakan terdapat lebih banyak kegiatan ke tingkat provinsi dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.480.000	71.760.000	(95,15)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	3.480.000,00	71.760.000	(95,15)

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan
Amortisasi Rp0

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumah Penyusutan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Beb. Masuk Tindakan	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Pajak Lainnya	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Pajak Perdagangan Internasional	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian Kewajiban
Jangka Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Terjadinya pos-pos luar biasa disebabkan sebagai berikut :

D.16 Rincian Beban Khusus Penanganan Pandemi Covid-19
Beban-beban yang khusus digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dirinci sebagai berikut:

Rincian Beban Khusus Penanganan Covid-19 Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Penjelasan tentang Beban Penanganan Covid-19 :
Beberapa akun tidak disajikan secara khusus karena pada awal penanganan pandemi belum menggunakan akun khusus, dan telah dipertanggungjawabkan bendahara dengan SPM/SP2D GUP tanggal 5 April 2020 senilai Rp45.000.000 , sehingga tidak teridentifikasi oleh sistem akuntansi

D.17 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E. 1 Ekuitas Awal Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.275.000,00 dan Rp.300.000,00										
Ekuitas Awal Rp275.000,00											
Defisit LO Rp.311.718.150,00	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.311.718.150,00 dan Rp.350.258.939,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.										
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0,00	E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.										
	E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .										
Penyesuaian Nilai Aset Rp0,00	E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.										
Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00	E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:										
	Rincian Koreksi Nilai Persediaan <table> <tr> <th>Jenis Persediaan</th><th>Nilai Koreksi</th></tr> <tr> <td>Koreksi Nilai Persediaan</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>-</td></tr> </table>	Jenis Persediaan	Nilai Koreksi	Koreksi Nilai Persediaan	-		-	Jumlah	-		
Jenis Persediaan	Nilai Koreksi										
Koreksi Nilai Persediaan	-										
	-										
Jumlah	-										
Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0,00	E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.										
	<table> <tr> <th>Jenis Koreksi</th><th>Nilai Koreksi</th></tr> <tr> <td>Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>-</td></tr> </table>	Jenis Koreksi	Nilai Koreksi	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-		-	Jumlah	-		
Jenis Koreksi	Nilai Koreksi										
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-										
	-										
Jumlah	-										
Selisih Revaluasi Aset Rp.0,00	E.4.4 Selisih Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:										
	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025 <table> <tr> <th>Jenis Aset</th><th>Nilai Koreksi</th></tr> <tr> <td>Ekuitas Transaksi Lainnya</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi</td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>Jumlah</td><td>-</td></tr> </table>	Jenis Aset	Nilai Koreksi	Ekuitas Transaksi Lainnya	-	Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-		-	Jumlah	-
Jenis Aset	Nilai Koreksi										
Ekuitas Transaksi Lainnya	-										
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-										
	-										
Jumlah	-										

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.315.171.873 dan Rp.350.233.939. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	316.612.150
Diterima dari Entitas Lain	(5.074.000)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	3.633.723
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	315.171.873

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 316.612.150, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 5.074.000

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.633.723 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3.728.723,00 dan Rp.275.000,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Akhir
Rp3.728.723

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada permasalahan terkait neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak Terapat Pengungkapan lain-lain



Muara Enim, 9 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Yurika Ariani, ST.,MM

NIP. 198007242006042003



PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB
JL. JEND A. YANI NO.17 A
MUARA ENIM

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS KEUANGAN PERKARA PERDATA

Pada Hari ini Senin tanggal Lima Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam telah dilakukan rekonsiliasi dengan kondisi sebagai berikut :

Menurut Buku :

I	Buku Induk Keuangan Perkara Perdata			
a	Saldo Akhir Bulan Lalu	Rp	39.908.740	
b	Penerimaan Bulan Ini	Rp	5.270.000	
c	Pengeluaran Bulan Ini	Rp	(4.767.800)	
	Jumlah I			Rp 40.410.940
II	Buku Keuangan Konsinyasi			
a	Saldo Akhir Bulan Lalu	Rp	742.195.212	
b	Penerimaan Bulan Ini	Rp	-	
c	Pengeluaran Bulan Ini	Rp	-	
	Jumlah II			Rp 742.195.212
III	Biaya Eksekusi			
a	Saldo Akhir Bulan Lalu	Rp	42.271.600	
b	Penerimaan Bulan Ini	Rp	-	
c	Pengeluaran Bulan Ini	Rp	(10.239.400)	
	Jumlah III			Rp 32.032.200
IV	Buku Keuangan Pidana			
a	Saldo Akhir Bulan Lalu	Rp	-	
b	Penerimaan Bulan Ini	Rp	-	
c	Pengeluaran Bulan Ini	Rp	-	
	Jumlah IV			Rp -
V	Buku Bantu Biaya Proses			
a	Saldo Akhir Bulan Lalu	Rp	-	
b	Penerimaan Bulan Ini	Rp	-	
c	Pengeluaran Bulan Ini	Rp	-	
	Jumlah V			Rp -
	Saldo Pembukuan (I + II + III + IV + V)			Rp 814.638.352

Menurut Kas :

Uang Tunai di Brankas	Rp	6.929.209	
Uang di Bank	Rp	808.452.143	
Materai	Rp	-	+
Saldo Kas			Rp 815.381.352
Selisih (saldo pembukuan - saldo kas)			Rp (743.000)

Selisih dikarenakan pendaftaran perkara kasasi sejumlah Rp 743.000 masuk pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2025 namun register perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan karena ditolak oleh sistem SIPP yang menyatakan kasasi telah lewat waktu 14 (empat belas) hari sehingga perkara tersebut diregister pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2026


FINNA PASTRI SIREGAR


HARMAN



LAPORAN KEUANGAN PERKARA PERDATA
BULAN DESEMBER 2025

Nomor	U R A I A N	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sisa Awal	Rp 39.908.740	
2	Penerimaan bulan ini	Rp 5.270.000	
3	Biaya Panggilan		Rp 246.500
4	Biaya Penerjemah		Rp -
5	Biaya Sita		Rp -
6	Biaya Pemeriksaan setempat		Rp 2.033.900
7	Biaya Sumpah		Rp -
8	Biaya Pemberitahuan berkas perkara : a. Gugatan b. Banding c. Kasasi d. P.K		Rp - Rp 58.400 Rp - Rp 19.400
9	Biaya Pengiriman berkas perkara : a. Banding b. Kasasi c. P.K		Rp 450.000 Rp - Rp -
10	Meterai		Rp 10.000
11	Hak-hak Kepaniteraan		Rp 410.000
12	Pengambilan sisa panjar kedua pihak berperkara		Rp 1.539.600
13	Biaya Pemberkasan / ATK		Rp -
	Saldo		Rp 40.410.940
JUMLAH		Rp 45.178.740	Rp 45.178.740

MUARA ENIM, 05 JANUARI 2026
PANITERA
HARMEN

[illegible]

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ)
BENDAHARA PENERIMAAN**



BULAN DESEMBER

**PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
TAHUN 2025**

LPJ DIPA O3 – 099232
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi/Kabupaten/Kot : (11.05) SUMATERA SELATAN / KAB. MUARA ENIM
Satuan Kerja : (099232) PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Tgl, No. SP DIPA : 02 Desember 2024 , DIPA-005.03.2.099232/2025
Tahun Anggaran : 2025
KPPN : (144) Lahat
Alamat dan No Telp : JALAN JENDERAL A.YANI NO 17A , (0734) 421194 ,

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 808.452.143,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. -

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	818.832.743,00	6.159.000,00	16.539.600,00	808.452.143,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	818.832.743,00	6.159.000,00	16.539.600,00	808.452.143,00
B.	BP Selain Kas	818.832.743,00	6.159.000,00	16.539.600,00	808.452.143,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	818.832.743,00	6.159.000,00	16.539.600,00	808.452.143,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1.	Uang Tunai di Brankas	Rp	0,00
2.	Uang di Rekening Bank (terlampir salinan rekening koran)	Rp	808.452.143,00 ^(*)
3.	Jumlah Kas	Rp	808.452.143,00

III. Selisih Kas

1.	Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp	808.452.143,00
2.	Jumlah Kas (II.3)	Rp	808.452.143,00 ^(*)
3.	Selisih Kas	Rp	0,00

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

1.	Saldo Awal	Rp	0,00
2.	Penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan ini	Rp	0,00 ^(*)
3.	Jumlah Penerimaan Negara	Rp	0,00
4.	Setoran atas penerimaan yang sudah menjadi hak negara bulan	Rp	0,00 ^(*)
	Saldo Akhir	Rp	0,00

V. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	188.500,00
3. Selisih	Rp	- 188.500,00

VI. Pembukuan dan fisik kas telah diperiksa oleh KPA dengan hasil sebagai berikut:

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 188.500,00 karena Selisih merupakan penyetoran PNBPFungsional

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



198007242006042003 198007242006042003

KAB. MUARA ENIM , 02 Januari 2026

Bendahara Penerimaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Iwan Fajri A.Md.', is written over the official stamp of Kabupaten Muara Enim.

IWAN FAJRI, A.Md

PENGATUR II/C 199008052020121004

Dicetak pada tanggal, 02 Januari 2026

Hasil Pemeriksaan Kas
Periode Desember 2025

Keadaan pembukuan bulan pelaporan dengan saldo akhir pada BKU sebesar Rp. 808.452.143,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00023/PKB/099232/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

A. Saldo Kas (Bank dan Tunai)	Rp.	808.452.143,00
B. Saldo Kas tersebut pada huruf A		
1. BP PNPB	Rp.	0,00
2. BP DPK	Rp.	808.452.143,00
3. BP Pajak	Rp.	0,00
4. BP Lainnya	Rp.	0,00
5. Jumlah	Rp.	808.452.143,00
C. Selisih Pembukuan (A-B5)	Rp.	0

II. Hasil Pemeriksaan Kas

A. Kas yang dikuasai bendahara		
1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	808.452.143,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	808.452.143,00
B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	0,00

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1 Penerimaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0,00
2 Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0,00
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	0,00
B Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	188.500,00
C Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 188.500,00

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00-
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00 karena Selisih merupakan penyetoran PNPB Fungsional

Bendahara Penerimaan


IWAN FAJRI, A.MD

PENGATUR TK I / IID 199008052020121004

Mengetahui
Kasir Pengguna Anggaran


YURIKA ARIANI

198007242006042003 198007242006042003

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN
SATKER 099232 (PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM)

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	7291572817	RPL 144 PDT PN MUARA ENIM UNTUK BIAYA PERKARA	BSI KC Muara Enim	30	S-565/KPN.0703/2024	05-12-2024	31-12-2025	808,452,143.00

Bendahara Penerimaan,



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara
** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

BERITA ACARA REKONSILIASI RPL
NOMOR BAR : 12/BPN-RPL GLP.099232/X/2025

Pada Hari ini, **Senin** tanggal **05 Januari 2026** telah diselenggarakan rekonsiliasi saldo RPL satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim periode bulan Desember 2025.

Rekonsiliasi dilakukan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan kedalam berita acara rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut :

- I. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Pembantu Bank (Bendahara Penerimaan)

No	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Bulan Pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan Pada Buku Pembantu Bank	Selisih
1.	Nomor Rekening :7291572817 Nama Rekening : RPL 144 PDT PN ME UTK BY PERKARA Nama Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Surat Izin Rekening: S-565/KPN.0703/2024	Rp. 808.452.143,-	Rp. 808.452.143,-	0

Penjelasan atas Selisih : -

- II. Rekonsiliasi antara rekening koran RPL (Kasir) dengan buku besar akrual akun kas lainnya di bendahara penerimaan 111825 (Operator GLP)

No	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Bulan Pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan Buku Besar Akrual Akun Kas Lain di Bendahara Penerimaan (111825)	Selisih
1.	Nomor Rekening :7291572817 Nama Rekening : RPL 144 PDT PN ME UTK BY PERKARA Nama Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Surat Izin Rekening: S-565/KPN.0703/2024	Rp. 808.452.143,-	Rp. 808.452.143,-	0

Penjelasan atas Selisih : -

Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam laporan keuangan satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim kode satker 099232 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti semua pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.


Kasir
Finna PASTRI Siregar, S.H
NIP.19941130 202012 2007


Bendahara Penerimaan
Iwan FARI, A.Md
NIP. 199008052820121004


Operator GLP
KMS.Muhammad Amin,SH.,MM.
NIP.19840611 201212 1005

Kuasa Pengguna Anggaran

Yurika Ariani, S.T., M.M.
NIP. 19800724 200604 2 003

Mengetahui,

Panitera

Harman, S.H.
NIP. 19700103 199303 1 003

BERITA ACARA REKONSILIASI RPL
NOMOR BAR : 12/BPN-RPL GLP.099232/X/2025

Pada Hari ini, Senin tanggal 05 Januari 2026 telah diselenggarakan rekonsiliasi saldo RPL satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim periode bulan Desember 2025.

Rekonsiliasi dilakukan secara bersama-sama yang hasilnya dituangkan kedalam berita acara rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut :

- I. Rekonsiliasi antara Rekening Koran RPL (Kasir) dengan Buku Pembantu Bank (Bendahara Penerimaan)

No	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Bulan Pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan Pada Buku Pembantu Bank	Selisih
1.	Nomor Rekening :7291572817 Nama Rekening : RPL 144 PDT PN ME UTK BY PERKARA Nama Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Surat Izin Rekening: S-565/KPN.0703/2024	Rp. 808.452.143,-	Rp. 808.452.143,-	0

Penjelasan atas Selisih : -

- II. Rekonsiliasi antara rekening koran RPL (Kasir) dengan buku besar akrual akun kas lainnya di bendahara penerimaan 111825 (Operator GLP)

No	Informasi Rekening RPL	Saldo Akhir Bulan Pada Rekening Koran RPL	Saldo Akhir Bulan Buku Besar Akrual Akun Kas Lain di Bendahara Penerimaan (111825)	Selisih
1.	Nomor Rekening :7291572817 Nama Rekening : RPL 144 PDT PN ME UTK BY PERKARA Nama Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Surat Izin Rekening: S-565/KPN.0703/2024	Rp. 808.452.143,-	Rp. 808.452.143,-	0

Penjelasan atas Selisih : -

Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam laporan keuangan satuan kerja Pengadilan Negeri Muara Enim kode satker 099232 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti semua pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.


Finna Pastris Siregar,S.H
NIP.19941130 202012 2007

Bendahara Penerimaan

Iwan Fairi, A.Md
NIP. 199008052020121004

Operator GLP

KMS.Muhammad Amin,SH.,MM.
NIP.19840611 201212 1005

Kuasa Pengguna Anggaran

Yurika Ariani S.T.M.M.
NIP. 19800724 200604 2 003

Mengetahui,

Panitera

Haynen,S.H.
NIP. 19700103 199303 1 003

RPL 144 PDT PN ME UTK BY PERKARA / IDR

Account : 7291572817
Date : 01 Dec 2025 - 31 Dec 2025
Opening Balance : IDR 818,832,743.00
Closing Balance : IDR 808,452,143.00
Total Debit Amount : IDR 18,539,800.00
Total Debit Record : 9
Total Credit Amount : IDR 6,150,000.00
Total Credit Record : 9
Branch : ID0018263

Date	FT Number	Description	Currency	Amount	DB	CR	Balance
2025-12-01 13:56:40	FT253354765W	transfer biaya PK 01 Trl Dari - YURKE MULPNIATWI	IDR	200,000.00	CR		819,032,743.00
2025-12-10 08:08:33	FT253447P60B	TATUN CEK CA 313487	IDR	15,800,000.00	DB		804,032,743.00
2025-12-11 15:06:12	FT25345X088C	Biaya Pemindahbukuan e-Banking	IDR	6,500.00	DB		804,026,243.00
2025-12-11 15:06:12	FT25345X088C	Pengembalian Sisa Parjur Perkara Banding No 12/PdLQ/2025/PM Me Trl Ka - 008 - BPK MURSI	IDR	975,500.00	DB		803,050,743.00
2025-12-11 15:54:30	FT25345XLTDLBNK	ATM BPI 8008740251211001 Trl Dari - 014 - EHSAN	IDR	17,000.00	CR		803,067,743.00
2025-12-11 19:34:22	FT253452JN0CBNK	MB BPI 8008740251211002 Trl Dari - IRSALDO AGUSTINUS	IDR	40,000.00	CR		803,107,743.00
2025-12-12 00:31:39	FT25346SYL4M	BIFAST - TRF Dari - Bank BCA GUNAWAN APRYADI	IDR	2,100,000.00	CR		805,207,743.00
2025-12-12 14:38:31	FT25346SDVYBNK	ATM BPI 8008740251212001 Trl Dari - 014 - RM DAGUS TRISARDONO R	IDR	28,000.00	CR		805,235,743.00
2025-12-12 14:44:14	FT25346JGT8G	Biaya Pemindahbukuan e-Banking	IDR	2,500.00	DB		805,233,243.00
2025-12-12 14:44:14	FT25346JGT8G	BIFAST - TRF Ka - Bank BPI Jg IRSALDO AGUSTINUS Pengembalian Sisa Parjur Gugatan No	IDR	136,300.00	DB		805,096,943.00
2025-12-12 15:03:21	FT25346XPSKABNK	ATM BPI 8008740251212002 Trl Dari - 008 - OKTA RIANSYAH	IDR	17,000.00	CR		805,113,943.00
2025-12-15 11:38:48	FT25348N032K	Pemindahbukuan Trl Dari - ARDIANTO	IDR	2,976,000.00	CR		808,089,943.00
2025-12-17 14:56:43	FT25351S0Y2BNK	ATM BPI 8008740251217001 Trl Dari - 008 - RAHMANSTAH	IDR	44,000.00	CR		808,125,943.00
2025-12-28 14:08:07	FT25363SVGD0BNK	ATM BPI 8008740251229001 Trl Dari - 014 - EHSAN	IDR	743,000.00	CR		808,868,943.00
2025-12-31 11:14:07	FT25365BNJHR	Biaya Pemindahbukuan e-Banking	IDR	2,500.00	DB		808,866,443.00
2025-12-31 11:14:07	FT25365BNJHR	BIFAST - TRF Ka - Bank BCA DEDEK MUTHA ALEX Pengembalian Sisa Parjur Perkara Ba	IDR	284,300.00	DB		808,582,143.00
2025-12-31 13:38:35	FT25365K06R2	BIFAST - TRF Ka - Bank Mandiri ADI ZULISTIAN Pengembalian Sisa Parjur Perkara Ba	IDR	127,500.00	DB		808,454,643.00
2025-12-31 13:38:35	FT25365K06R2	Biaya Pemindahbukuan e-Banking	IDR	2,500.00	DB		808,452,143.00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

Provinsi/Kabupaten/Kota : (11.05) SUMATERA SELATAN / KAB. MUARA ENIM

Satuan Kerja : (099232) PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Alamat dan No Telp : JALAN JENDERAL A.YANI NO 17A , (0734) 421194

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-005.03.2.099232/2025

Tahun : 2025

KPPN : (144) Lahat

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00001/SSBP/099232/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	13.387.000,00	324.120,00	13.711.120,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	13.387.000,00	324.120,00	13.711.120,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	13.387.000,00	324.120,00	13.711.120,00	0,00
	1. BP UP*)	13.387.000,00	232.500,00	13.619.500,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	91.620,00	91.620,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00 (terfampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00

B. TUP

1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00

C. Lainnya

1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

- 1. Selisih Kas (III.3) : 0,00 karena Tidak ada selisih kas
- 2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena Tidak ada selisih pembukuan UP
- 3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00 karena Tidak ada selisih pembukuan TUP
- 4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00 karena Tidak ada selisih pembukuan lainnya

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



YURIKA ARIANI

198007242006042003 198007242006042003

KAB. MUARA ENIM, Desember 2025

Bendahara Pengeluaran



NANDA

199904282022032009 199904282022032009

**Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Pengeluaran**

Pada hari ini, Rabu tanggal 31 bulan Desember tahun 2025, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 654440992321000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0,00 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00001/SSBP/099232/2025

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	0,00
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
3 Saldo BP BPP	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	0,00
2 Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3 Saldo LS-Bendahara	Rp.	0,00
4 Saldo Pajak	Rp.	0,00
5 Saldo Hibah	Rp.	0,00
6 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6)	Rp.	0,00

C. Selisih pembukuan (A4-B6)	Rp.	0,00
------------------------------	-----	------

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0,00
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0,00
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0,00

B. Selisih Kas (I.A.-II.A.3)	Rp.	0,00
------------------------------	-----	------

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1 a. Saldo UP	Rp.	0,00
b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP	Rp.	0,00
2 a. Saldo TUP	Rp.	0,00
b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp.	0,00
c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP	Rp.	0,00
3 Saldo Lainnya	Rp.	0,00
4 Jumlah (A1+A2+A3)	Rp.	0,00

B. Pembukuan menurut UAKPA

1 Kas UP di Bendahara	Rp.	0,00
2 Kas TUP di Bendahara	Rp.	0,00
3 Kas Lainnya di Bendahara	Rp.	0,00
4 Jumlah (B1+B2+B3)	Rp.	0,00

C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4)	Rp.	0,00
--	-----	------

IV. Penjelasan atas selisih

- A. Selisih Kas (II.B)
0,00 karena Tidak ada selisih kas
- B. Selisih Pembukuan UP (III.C)
0,00 karena Tidak ada selisih pembukuan UP
- C. Selisih Pembukuan TUP (III.C)
0,00 karena Tidak ada selisih pembukuan TUP
- D. Selisih Pembukuan Lainnya (III.C)
0,00 karena Tidak ada selisih pembukuan lainnya

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran



NANDA

199904282022032009 199904282022032009

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



YURIKA ARIANI

198007242006042003 198007242006042003

Diketak pada tanggal 02 Januari 2020

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 099232

BULAN : DESEMBER 2025

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65444099232100	BPg 144 PN MUARA ENIM	-	20	S-930/WPB.12/KP.0 6/2021	27-05-2020	2025-12-29	0.00

BENDAHARA PENGELUARAN



199904282022032009 199904282022032009

MANDA

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2025

Kementerian / Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Propinsi / Kabupaten / Kota : (11.05) SUMATERA SELATAN / KAB. MUARA ENIM
Satuan Kerja : (099232) PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM09923200-
No Rekening : 654440992321000
Nama Rekening : BPg 144 PN MUARA ENIM
Nama Bank : -
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan November 2025			0,00
08-12-2025	FPK-PENG-CbFNsb1aeUPjBow	GUP KKP	232.500,00	0,00	232.500,00
08-12-2025	FPK-PENG-MpIU1nFRB0On5j4	Pembayaran tagihan kkp kepada pihak bank	0,00	232.500,00	0,00
29-12-2025	FPK-PENG-vysNuHwzsTveQWQ	SP2D GUP NIHIL	0,00	0,00	0,00
Jumlah			232.500,00	232.500,00	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



199904282022032009 199904282022032009

Dibuat pada tanggal 02 Januari 2025

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Lahat - 144

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pajak PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM (099232)

Cetak Tanggal 02-01-2026
Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	014	410382	22-Dec-25	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM DIREKTORAT JENDERAL B 0001034412313000	94E622ME7UMUE1D K 933499145447	411618	IDR	91,620	ADA
TOTAL									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198904282022032009 pada 02-01-
2026 16:12:21 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Lahat - 144

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBP PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM (099232)
Cetak Tanggal 02-01-2026
Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	144	099232	05-Des-25	Bendahara Penerimaan 000000000000000	1712748VVOODCS08 251205003982	425239	IDR	90,000	ADA
2	144	099232	05-Des-25	Bendahara Penerimaan 000000000000000	510FA61QVDT66S6I 251205004117	425239	IDR	28,500	ADA
3	144	099232	05-Des-25	Bendahara Penerimaan 000000000000000	884592G503JKIREC 251205004158	425232	IDR	10,000	ADA
4	144	099232	05-Des-25	Bendahara Penerimaan 000000000000000	CF1AB2G503JKIS98 251205004255	425239	IDR	60,000	ADA
5	144	099232	30-Des-25	PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM DIREKTORAT JENDERAL B 000000000000000	8A7B40JUTPI5DSEA 251230039879	815111	IDR	574,800	ADA

TOTAL

763,300

-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran,
Dicetak oleh 199904282022032009 pada 02-01-
2026 16:12:21 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Lahat - 144

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi Pengembalian Belanja PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM (099232)
Cetak Tanggal 02-01-2026
Periode : 2025-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL									-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 199804282022032009 pada 02-01-
2026 16:12:21 WIB.

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA

Periode : 2025-12

Kode Satker : 099232

Nama Satker : PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Kode KPPN : 144

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT

A. Kepatuhan Bendahara

No.	Uraian	Usia Transaksi	Nilai / Jumlah
1	Dana Pajak Belum disetor	> 30 Hari	Rp.0.00
2	Dana LS Belum Dibayarkan	> 60 Hari	Rp.0.00
3	Kas Tunai Lebih 50 Juta	> 1 Hari Kerja	-
4	Data rekening belum divalidasi	-	0

B. Monitoring KAS

No.	Uraian	Nilai
1	Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai UP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank UP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) UP	Rp.0.00
	d. BP BPP UP	Rp.0.00
	e. Kwitansi UP	Rp.0.00
2	Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.0.00
	a. BP Kas Tunai TUP	Rp.0.00
	b. BP Kas Bank TUP	Rp.0.00
	c. BP UM (voucher) TUP	Rp.0.00
	d. BP BPP TUP	Rp.0.00
	e. Kwitansi TUP	Rp.0.00
3	Kas UP + Kas TUP	Rp.0.00
4	Kas Lainnya	Rp.0.00
	a. Saldo Lainnya Tunai	Rp.0.00
	b. Saldo Lainnya Bank	Rp.0.00
	c. Saldo Lainnya UM	Rp.0.00
	d. Saldo Lainnya di BPP	Rp.0.00
5	Total Kas Bendahara (UP+TUP+Lainnya)	Rp.0.00

Catatan:

- 1 Suplemen LPJ Bendahara disusun secara otomatis oleh sistem SAKTI.**
- 2 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan KPA/PPK sebelum Approve LPJ.**
- 3 Suplemen LPJ Bendahara dapat digunakan sebagai bahan pembinaan KPPN kepada satker mitra kerjanya.**

Dioetak pada tanggal 02 Januari 2026

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 099232 PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Tanggal : 10/02/2026 17.51.01
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : lap_crbmn_instm_satker_p

JENIS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

MUARA ENIM, 10 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KUASA PENGGUNA BARANG
YURIKA ARIANI S.T., M.M
198007242006042003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KPPN LAHAT

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 099232 - PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 09/02/26 7:36
Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	323,391,000	323,391,000	0
2	Belanja	316,612,150	316,612,150	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	25,892,000	25,892,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	5,074,000	5,074,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 22 Januari 2026

